

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis gender gap dalam ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik di Indonesia tahun 2010-2017, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat potret gender secara nasional di Indonesia menggunakan perhitungan UNDP yaitu dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan gender (IPG) Indonesia mencapai 90,96 persen dimana kesetaraan dicapai apabila mencapai 100 persen.
2. Pembangunan manusia berbasis gender memiliki makna perbaikan kualitas hidup yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Idealnya, peningkatan pembangunan gender akan menciptakan keseimbangan pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya, fenomena peningkatan kualitas pembangunan perempuan belum sepenuhnya diimbangi oleh peran aktif di sektor publik terjadi di beberapa wilayah. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia mencapai 71,74.
3. Melihat perkembangan potret gender dalam berbagai aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik di Indonesia. Pada aspek ekonomi,

pembangunan dan pemberdayaan gender dihitung dengan menggunakan indikator pengeluaran pendapatan, tenaga professional, dan sumbangan pendapatan. Pengeluaran pendapatan 58,61 persen, perempuan sebagai tenaga professional 46,31 persen dan sumbangan pendapatan 36,62 persen, sedangkan ramalan yang telah diprediksi hingga tahun 2022 akan terus mengalami peningkatan meskipun dengan lambat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam aspek ekonomi target pembangunan gender di Indonesia masih jauh dari kesetaraan. Dalam aspek ekonomi dan tenaga kerja berbagai permasalahan gender masih umum terjadi. Perempuan kebanyakan masih terbelenggu budaya dan norma yang lebih menempatkan mereka untuk menjalani peran pada pekerjaan domestik dibanding pekerjaan sektor publik. Sesuai dengan data BPS (2017), dimana partisipasi perempuan di dunia kerja pada tahun 2017 TPAK perempuan berada di angka 50,89. Capaian ini jauh lebih rendah dibanding laki laki dengan TPAK sebesar 82,51 (BPS, 2017). Kondisi ini tidak banyak berubah dalam 20 tahun terakhir. Ketimpangan Partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan umumnya terjadi di negara berkembang (Verick, 2014).

4. Pada aspek pendidikan, pembangunan dan pemberdayaan gender dihitung dengan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah. Dunia pendidikan di Indonesia sudah tidak ada lagi keterbatasan baik perempuan maupun laki-laki untuk menempuh pendidikan. Terbukti dengan rata-rata lama sekolah yang dicapai pada tahun 2017 hingga 89,37 persen Sedangkan ramalan yang telah diprediksi hingga tahun 2022 akan terus mengalami peningkatan sampai 90,50 persen.
5. Pada aspek kesehatan, pembangunan dan pemberdayaan gender dihitung dengan menggunakan indikator angka harapan hidup dimana telah mencapai 105,64 persen, sedangkan ramalan yang telah diprediksi hingga tahun 2022 akan terus mengalami penurunan sampai 105,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih memperhatikan kesehatannya dibandingkan dengan laki-laki. Namun kenyataannya masih banyak terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan seperti yang telah diungkapkan oleh Kemen PPPA (2019), terdapat 5509 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi sepanjang tahun 2018, sebanyak 3230 kasus merupakan kasus pemerkosaan.
6. Pada aspek politik, pembangunan dan pemberdayaan gender dihitung dengan menggunakan indikator keterlibatan perempuan dalam parlemen dimana telah mencapai 17,32 persen, sedangkan ramalan yang telah diprediksi hingga tahun 2022 akan terus mengalami penurunan sampai 17,13 persen. Perbedaan yang cukup tinggi pada keterlibatan antara laki-laki dan perempuan dalam parlemen

selama ini, secara langsung disebabkan oleh minimnya perempuan untuk berpartisipasi kerja dalam dunia politik.

B. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Saran untuk perkembangan berikutnya adalah :

1. Untuk mewujudkan kesetaraan gender secara menyeluruh, pentingnya peran pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang tegas. Peranan ini mengarah kepada sasaran pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan perempuan mencapai pada tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakatnya serta mengurangi angka kemiskinan.
2. Peninjauan kembali berbagai kebijakan tentang ketenagakerjaan yang membatasi perempuan dalam ketenagakerjaan harus dilakukan. Kebijakan-kebijakan yang mempersempit kesempatan perempuan dalam ketenagakerjaan menjadikan perempuan semakin terpinggirkan dan tidak berkembang. oleh karena itu dengan meningkatnya bidang pendidikan dan kesehatan perempuan, perumusan kebijakan yang responsif gender dan menghapus bentuk-bentuk diskriminasi terhadap upah dan bentuk-bentuk pekerjaan

3. Seharusnya kesempatan dalam dunia kerja bagi perempuan lebih terbuka lebar. Karena pendidikan yang baik dan kesehatan yang baik bagi perempuan akan menciptakan kualitas tenaga kerja perempuan yang baik pula, untuk itu kualitas pendidikan perlu ditingkatkan. Karena Pendidikan yang rendah tentunya tidak memungkinkan bagi wanita untuk berkiprah di sektor publik, ekonomi, politik, kesehatan dan sebagainya.
4. Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, namun kasus kekerasan terhadap perempuan masih sering dijumpai, maka dari itu perlunya kebijakan pemerintah yang tegas untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan
5. Pengupayaan kebijakan dalam memberikan regulasi yang mewajibkan partai politik dalam anggaran dasar dan rumah tangganya untuk memberdayakan perempuan. Peningkatan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan, terutama perlindungan maternitas.
6. Masih terdapat berbagai ironi yang menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya berdaya dan setara. Berbagai contoh ketimpangan gender yang masih terjadi menyadarkan semua pihak bahwa masih perlu berbagai upaya untuk menghapuskan berbagai perbedaan dan menciptakan kehidupan yang bersifat adil secara gender.